



KATALOG : 9299.71

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGGUNAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

2000-2006



Badan Pusat Statistik, Sulawesi Utara - Indonesia

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI SULAWESI UTARA
MENURUT PENGGUNAAN
2000 - 2006

Nomor Katalog : 9204.71
ISBN : 979-488-520-7
Nomor Publikasi : 71550.0702

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado-Indonesia

Dicetak Oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kata Pengantar

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan 2000-2006 merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang menggunakan tahun dasar 2000. Publikasi tersebut memberikan gambaran umum terutama tentang perkembangan berbagai kinerja perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan PDRB menurut penggunaan selama periode 2000-2006, baik yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Materi yang disajikan diantaranya mengenai konsep, definisi, dan uraian ringkas PDRB menurut penggunaan, yang dilengkapi dengan beberapa tabel dan gambar pendukung.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga dapat diterbitkannya publikasi ini disampaikan terima kasih. Berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan dalam penyusunan publikasi ini, namun disadari bahwa masih banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun cara penyajiannya. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan masukan yang berharga guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Manado, September 2007

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Drs. Jasa Bangun, MSi
NIP. 340005025

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
I. Pendahuluan	1
1.1 PDRB Menurut Penggunaan	1
1.2 Perubahan Tahun Dasar	3
II. Ruang Lingkup dan Definisi	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5
2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	6
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	9
2.5 Perubahan Stok	11
2.6 Ekspor dan Impor	12
III. Metode Penghitungan dan Sumber Data	13
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	14
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14
3.4 Pembentukan Model Tetap Bruto	15
3.5 Perubahan Stok	15
3.6 Ekspor dan Impor	16
IV. Tinjauan PDRB Menurut Penggunaan	17
4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18
4.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	21
4.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23
4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	24
4.5 Ekspor dan Impor	25

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 4.1. Komposisi Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB adhb dan adhk, 2000-2006 (dalam persen)	18
Tabel 4.2. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adhb dan adhk, 2000-2006 (dalam persen)	18
Tabel 4.3. Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit, 2000-2006	21
Tabel 4.4. Konsumsi Pemerintah, 2000-2006.....	22
Tabel 4.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2000-2006	23
Tabel 4.6. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, 2000-2006	24

Daftar Gambar

	<i>Halaman</i>
Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, 2000-2006	16
Gambar 4.2. Distribusi Komponen PDRB Menurut Penggunaan, 2006	17
Gambar 4.3. Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2000-2006	19
Gambar 4.4. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba adhb dan adhk, 2000-2006 ..	20
Gambar 4.5. Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit, 2000-2006	21
Gambar 4.6. Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah, 2000-2006	23
Gambar 4.7. Nilai Ekspor, Impor Barang dan Jasa ADHB, 2000-2006	25
Gambar 4.8. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, 2000-2006	26

Daftar Lampiran

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2000-2006 (dalam jutaan rupiah).....	27
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2000-2006 (dalam jutaan rupiah)	28
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2000-2006 (Persen)	29
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2000-2006 (Persen)	30
Tabel 5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (2000 = 100)	31
Tabel 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, (2000 = 100)	32
Tabel 7. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun Sebelumnya = 100)	33
Tabel 8. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Tahun Sebelumnya = 100)	34
Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto.....	35
Tabel 10. Pertumbuhan	36

BAB I

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi makro yang semakin penting keberadaannya, baik di tingkat nasional maupun regional, di mana penghitungannya dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*).

Tersedianya data PDRB secara rinci dan berkesinambungan akan membantu perencana dalam mengevaluasi hasil pembangunan serta merencanakan pembangunan di masa yang akan datang, khususnya di bidang ekonomi .

1.1 PDRB MENURUT PENGGUNAAN

PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB yang demikian disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDRB dari sisi penyediaan (*supply side*).

PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi permintaan domestik di suatu wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. PDRB yang demikian disebut PDRB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*), atau bisa juga disebut sebagai PDRB dari sisi permintaan (*demand side*).

Pada garis besarnya permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, bila dilihat dari segi penggunaannya, digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi, yang disebut dengan konsumsi antara (*intermediate consumption*).

- b. Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara, akan habis dalam proses produksi, sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi:
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit
 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
 5. Perubahan stok
 6. Ekspor dan impor

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, tidak saja berasal dari produksi domestik, tetapi juga berasal dari impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Secara ringkas keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y + M = C + IF + IS + E$$

di mana :

- Y = Produk Domestik
- M = Impor
- C = Konsumsi RT, Pemerintah dan Lembaga Swasta Nirlaba
- IF = PMTB
- IS = Perubahan Stok
- E = Ekspor

Oleh karena tujuannya adalah menghitung produk domestik (pendapatan yang ditimbulkan di daerah tersebut), maka persamaan tersebut di atas dapat diturunkan menjadi :

$$Y = C + IF + IS + E - M$$

Dengan demikian, dalam penyajian PDRB menurut penggunaan harus dihitung komponen-komponen permintaan akhir.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR (*REBASING*)

Untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan PDRB, dipakai suatu tahun dasar yang ditetapkan sebagai dasar rujukan untuk penghitungan PDRB, di mana tahun dasar tersebut digunakan sebagai pijakan untuk menghitung perubahan-perubahan agregat ekonomi, seperti nilai riil, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks implisit, baik untuk PDRB maupun masing-masing komponen permintaan akhir. PDRB juga dipakai sebagai waktu rujukan atau menjadi tahun konstan dalam pengukuran PDRB terutama jika ingin mengesampingkan aspek harga.

Dalam periode pembangunan jangka panjang tahap pertama, penghitungan PDRB telah mengalami empat kali pergantian tahun dasar yakni 1960, 1973, 1983 dan 1993. Pada publikasi tahun lalu penghitungan PDRB masih menggunakan tahun dasar 1993, akan tetapi pada tahun ini penghitungan nilai PDRB sudah menggunakan tahun dasar 2000.

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi penggantian tahun dasar 1993 menjadi 2000 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997, hadirnya krisis ekonomi juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Secara ringkas bisa dinyatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah berbeda dengan tahun 1993 sehingga seri data PDRB tahun 1993 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.
2. Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil.
3. Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku panduan yang baru “Sistem Neraca Nasional” dinyatakan bahwa estimasi PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5 dan hal ini juga sudah didukung oleh komitmen pimpinan BPS negara Asean tahun 2000. Hal itu dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB dapat saling diperbandingkan antar wilayah dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.
4. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) maupun Indeks Harga Konsumen (IHK) menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun dasar 2000. Penyempurnaan metodologi berikut perluasan cakupan komoditinya akan menghasilkan suatu

series IHPB dan IHK baru yang akan digunakan sebagai deflator dalam penghitungan estimasi PDB sektoral maupun penggunaan.

5. Ketersediaan data dasar (*raw data*) baik harga (*price*) maupun volume (*quantum*) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Hal ini dimungkinkan karena berbagai departemen/kementerian maupun instansi pemerintah lainnya juga ikut membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-masing. Dengan dukungan data-data yang lebih lengkap dan terinci serta berkesinambungan, diharapkan estimasi PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

<http://sulut.bps.go.id>

BAB II

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa (barang tahan lama maupun barang tak tahan lama) baik yang diperoleh dari pihak lain maupun yang dihasilkan sendiri, dikurangi nilai penjualan neto (penjualan dikurangi pembelian) barang-barang bekas dan barang sisa, yang dilakukan oleh suatu rumah tangga untuk periode tertentu (biasanya satu tahun).

Yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa-jasa, pengeluaran untuk barang yang tidak ada duanya (tidak di produksi kembali) seperti karya seni, barang antik. Barang tahan lama seperti mobil, motor, furniture, radio, kulkas, televisi, dll serta pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya juga termasuk di dalam konsumsi rumah tangga.

Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon, dll, merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam hal barang yang mempunyai kegunaan ganda, maka pembelian dan biaya operasional barang tersebut harus di *alokir* secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan, misalnya mobil, selain digunakan untuk keperluan rumah tangga juga dipakai sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga ybs (sebagai alat angkut para pegawai dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga). Sama halnya dengan pengeluaran terhadap sewa, bahan bakar, listrik, air, dan jasa lainnya yang dipakai untuk bermacam-macam aktivitas oleh anggota rumah tangga, juga harus diperkirakan pengeluarannya untuk masing-masing kegiatan tersebut terhadap sumbangan yang diberikan.

Pengeluaran pegawai yang merupakan biaya antara bagi perusahaan tidak dianggap sebagai konsumsi rumah tangga, misalnya, pembelian alat-alat kerja seperti lampu senter, bahan peledak dan lain-lain oleh buruh tambang untuk melakukan pekerjaannya.

Ada dua jenis konsep yang dipakai dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada wilayah domestik atau *region*.
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada rumah tangga penduduk suatu *region*.

Pengertian konsep pertama adalah pengeluaran oleh anggota rumah tangga di suatu *region*, tidak terkecuali oleh penduduk atau bukan penduduk *region* tersebut. Jadi dalam hal ini semua pengeluaran oleh anggota rumah tangga staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, anggota militer dan lain-lain yang berada di suatu wilayah, serta pengeluaran turis asing adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam *region* tersebut.

Pengertian konsep yang kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah domestik ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar *region*, dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga bukan penduduk yang dilakukan di dalam *region* tersebut.

Pengeluaran rumah tangga yang sedang mengadakan perjalanan dinas, yang pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan atau kantor, tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga, karena merupakan biaya antara dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Konsep pengeluaran rumah tangga yang dipakai dalam komponen PDRB adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk (konsep kedua).

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tidak langsung neto, dikurangi dengan penjualan barang-barang bekas/tak terpakai.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan formal maupun non formal, badan-badan kesehatan dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung mungkin saja mempunyai badan hukum dan mungkin saja tidak. Lembaga/badan swasta yang tidak mencari untung, yang masalah keuntungannya dan pengawasannya sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah dan merupakan bagian kegiatan dari pemerintah, tidak termasuk di dalam lembaga ini.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran yang dimaksud adalah sama dengan nilai jasa yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi sendiri. Nilai dari jasa ini adalah sebesar nilai produksi bruto dikurangi dengan jumlah penjualan barang dan jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat desa, sedangkan pemerintah pusat mencakup semua badan/lembaga tinggi negara, departemen dan unsur departemen serta instansi lain beserta jajarannya di daerah sebagai dinas instansi vertikal. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti Perum, Perjan, PT (Persero, PN) dan lainnya tidak termasuk dalam kegiatan pemerintah karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing.

Kegiatan pemerintah adalah menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan mengatur kebijaksanaan perekonomian negara lainnya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri secara langsung tidak mungkin dapat diperoleh karena produksi sektor ini tidak ada/tidak dijual. Oleh karena itu, besarnya nilai produksi yang dikonsumsi sendiri dapat diperkirakan dengan cara menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Biaya yang dimaksud adalah:

1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai baik berbentuk uang maupun barang, termasuk belanja pension, uang lembur, honorarium, lauk pauk dan belanja pegawai lainnya.

- Belanja pegawai mencakup pegawai pemerintah pusat dan pegawai pemerintah daerah, baik sipil maupun militer.
2. Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, mencakup semua biaya kantor seperti pembelian alat-alat tulis kantor, pembayaran listrik, telepon, air, dan gas, belanja perjalanan dinas pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, perbaikan kantor dan rumah dinas serta pengeluaran rutin lainnya. Pembelian terhadap barang-barang modal tidak termasuk dalam belanja barang, kecuali pembelian barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan.
 3. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang-barang strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar tidak dimasukkan dalam pengeluaran konsumsi pemerintah, akan tetapi dimasukkan sebagai stok.
 4. Pengeluaran penyusutan barang-barang modal pemerintah. Besarnya penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja pegawai.

Apabila ketiga macam pengeluaran di atas dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa pemerintah, maka hasilnya merupakan jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah.

Hasil penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat, baik yang pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau kemungkinan dibawah harga pokok, maupun penerimaan penjualan hasil produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan sebagai unit industri (hasil penjualan karcis masuk gedung museum, gedung kesenian, kebun binatang, yang dikelola oleh pemerintah) penjualan buku publikasi, bibit pertanian dan sebagainya.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengertian konsep Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam suatu *region* adalah semua barang modal baru yang digunakan atau di pakai sebagai alat untuk proses produksi di suatu *region*. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar *region*, ataupun dari pengadaan di *region* itu sendiri.

Jenis barang yang dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur satu tahun atau lebih. Pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi.

Barang-barang yang tidak dapat diproduksi kembali, seperti tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam PMTB. Selanjutnya pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan, dll, serta untuk perluasan areal pertambangan, semuanya adalah merupakan pengeluaran untuk PMTB.

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk PMTB. Jadi pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pembelian barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, tidak termasuk kategori PMTB. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal afkiran dari dalam *region*, juga tidak termasuk PMTB karena barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada pertama kali dibeli. Lain halnya dengan barang modal bekas yang dibeli dari luar *region* adalah merupakan PMTB karena di dalam *region* barang tersebut belum pernah dihitung.

Pembelian atau pembuatan barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer, seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, persenjataan, bangunan dan barang-barang lainnya, tidak termasuk dalam pembentukan modal karena bersifat konsumtif.

PMTB mencakup:

1. Pembentukan modal tetap di sektor bangunan yang terdiri atas :
 - a. Bangunan tempat tinggal.
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal.
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya, seperti: jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar televisi, bandar udara, pelabuhan laut/sungai, jaringan pipa untuk minyak, gas, air dll.
2. Pembentukan modal tetap dalam mesin dan alat-alat perlengkapan, yang terdiri atas:
 - a. Alat-alat transpor, seperti: kapal laut, pesawat udara, kereta api, bus, truk, dll.
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan
 - c. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian.
 - d. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jembatan, jalan, dll.
 - e. Mesin-mesin dan perabot untuk keperluan kantor, toko, hotel, restoran, rumah sakit, dll.
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Pengertian/konsep tanaman keras disini adalah bermacam-macam tanaman yang hasilnya baru akan

diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil/kegiatan, dan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan pemerintah/perusahaan.

4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya, bulunya atau dipakai tenaganya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
5. Margin perdagangan atau makelar, *service charge* dan ongkos-ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak perusahaan hutan, hak paten, hak cipta termasuk dalam pembentukan modal tetap.

Dalam hal bangunan atau konstruksi, dikarenakan jangka waktu penyelesaiannya ada yang lebih dari satu tahun sehingga bangunan tersebut pada waktu penghitungan pembentukan modal masih dalam pengerjaan (belum selesai seluruhnya), maka yang harus dihitung adalah bagian yang sudah selesai saja dari bangunan tersebut dengan memperkirakan nilainya. Nilai perkiraan dari bangunan ini merupakan pembentukan modal tetap pada tahun tersebut. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dalam proses pembuatan, tidak termasuk dalam penghitungan modal tetap bruto tetapi merupakan stok dari produsennya.

2.5 Perubahan Stok

Stok adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun, baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang keperluan strategis, seperti bahan pangan yang akan dikeluarkan kepasar pada waktu krisis. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang-barang yang belum dipasarkan.

2.6 Ekspor Dan Impor

Ekspor dan impor meliputi transaksi barang dan jasa antara masyarakat suatu *region* dengan masyarakat *region* lain (termasuk dengan negara lain). Transaksi tersebut

meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa komunikasi, jasa pariwisata, jasa asuransi dan berbagai jasa lainnya, seperti jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang *region* tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa yang langsung di beli di pasar domestik yang dilakukan oleh bukan penduduk *region* tersebut.

Transaksi barang dan jasa yang dimaksud adalah semua barang dan jasa yang meliputi batas geografis suatu *region* atau negara, termasuk daerah pabean dan daerah bebas pajak. Penjualan dan pembelian pesawat terbang dan kapal laut, baik yang baru maupun yang bekas, ke atau dari suatu negara atau *region* lain merupakan kegiatan ekspor dan impor barang. Barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang di beli pada waktu merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau *region* dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk atau *region* kepada kapal asing atau *region* lain, adalah merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan dalam ekspor dan impor. Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu *region*, tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, misalnya, barang-barang untuk peragaan, barang-barang sebagai bahan penyelidikan, barang-barang milik turis atau penumpang, tidak termasuk kegiatan ekspor dan impor.

BAB III

METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sumber data utama untuk memperkirakan nilai konsumsi rumah tangga adalah berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Sulawesi Utara. Besaran konsumsi di dapat dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, sedangkan untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi, nilainya diperoleh dari hasil pengolahan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil Susenas, diperoleh rata-rata konsumsi bahan makanan per kapita per minggu dan rata-rata nilai konsumsi non makanan per kapita per bulan. Untuk memperoleh nilai konsumsi bahan makanan sebulan adalah dengan cara mengalikan nilai konsumsi per kapita per minggu dengan angka tiga puluh yang kemudian dibagi dengan angka tujuh, sedangkan untuk memperkirakan nilai konsumsi bahan makanan dan non makanan setahun diperoleh dengan cara mengalikan nilai konsumsi per kapita per bulan dengan angka dua belas kemudian dikalikan kembali dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkiraan nilai konsumsi rumah tangga untuk tahun yang tidak tersedia data Susenas adalah dengan membuat kecenderungan pergerakan nilai konsumsi tahunan dan dengan memperhatikan kenaikan laju inflasi. Perhitungan ini berlaku baik untuk bahan makanan maupun non makanan.

Nilai konsumsi rumah tangga non makanan atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai berlakunya, yaitu membagi konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum pada tahun yang bersangkutan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berasal dari Susenas ini, telah dilengkapi dengan perkiraan besarnya konsumsi makanan/minuman yang di konsumsi di luar rumah.

3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan pendapatan regional menurut lapangan usaha sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa tersebut meliputi jasa sosial kemasyarakatan yang dikategorikan sebagai lembaga swasta yang tidak mencari untung, seperti kegiatan sarana kesehatan, panti asuhan, sekolah dan tempat ibadah, sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti dokter praktek, bidan/dukun bayi dan dokter gigi tidak dimasukkan dalam kategori ini.

Dari hasil penghitungan nilai PDRB menurut lapangan usaha, diperoleh perkiraan nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya, serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin, diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara, sedangkan untuk pengeluaran pemerintah dalam hal ini daerah otonom tingkat I, tingkat II, dan tingkat desa, diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Kalau diteliti lebih lanjut, pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya, sedangkan yang lainnya tidak dimasukkan karena merupakan transfer.

Dari kelompok pengeluaran pembangunan, pengeluaran yang tujuan utamanya untuk peningkatan fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah, sedangkan pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengeluaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha (sektor), sedangkan kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang.

Perkiraan PMTB atas dasar harga yang berlaku, diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke *region* dan barang modal yang masuk antar *region*/antar pulau ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/bangunan.

Perkiraan nilai PMTB atas dasar harga konstan tahun 2000, diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai PMTB (nilai barang impor) atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) impor dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau.

3.5. Perubahan Stok

Perubahan stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan). Dalam menghitung perubahan stok dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Langsung

Nilai stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Berdasarkan laporan neraca keuangan perusahaan hasil survei tahunan, diperoleh nilai stok pada awal tahun dan akhir tahun yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

2. Metode Tidak Langsung (Metode Arus Barang)

Nilai stok diperoleh dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini hanya tersedia untuk beberapa jenis barang. Oleh karena itu, komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari PDRB yang dihitung secara sektoral dikurangi komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

Penghitungan perubahan stok ditaksir sebagai residual karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk membuat perkiraan perubahan stok. Dengan demikian, stok merupakan sisa, yaitu PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dikurangi konsumsi rumah

tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor neto (ekspor-impor) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

3.6. Ekspor Dan Impor

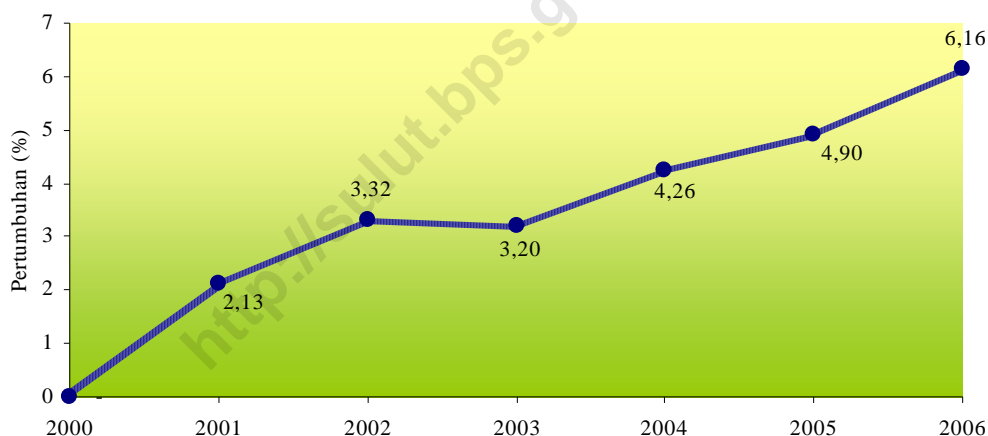
Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor di tingkat *region* masih sangat terbatas. Ekspor dan impor ditingkat *region* ini meliputi transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri dan antar pulau/antar provinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan 2000 dengan cara sebagai berikut: a) nilai ekspor *dideflate* dengan IHPB umum ekspor tanpa minyak, dan b) nilai impor *dideflate* dengan IHPB umum kelompok impor.

Nilai barang yang keluar antar pulau/*region* atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara *mendeflate* masing-masing dengan IHPB umum. Data mengenai ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan impor terbitan dari Departemen Perdagangan, sedangkan untuk barang yang keluar dan masuk antar pulau/provinsi diperoleh dengan cara menghitung selisih produksi domestik dengan konsumsi domestik. Konsumsi domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi industri.

BAB IV

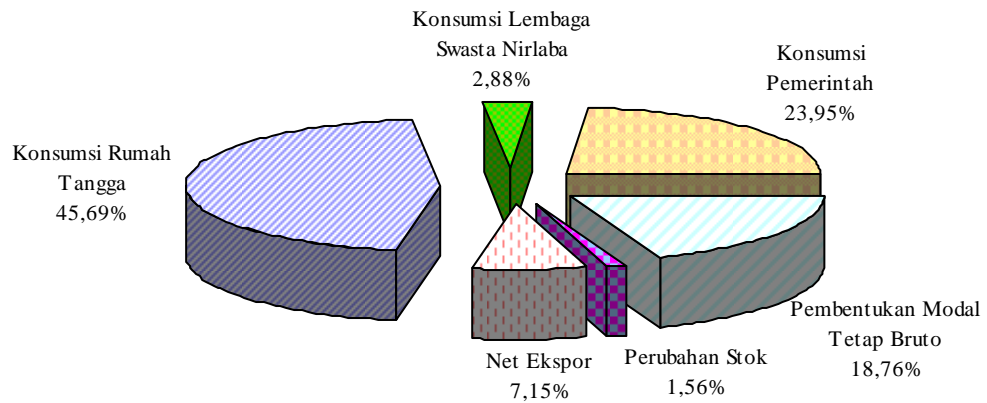
Tinjauan PDRB Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan

Dalam kurun waktu 2000-2006, PDRB Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, kinerja perekonomiannya mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2006 tercatat sebesar 6,16 persen dengan nilai PDRB sebesar 13,5 triliun rupiah lebih tinggi dari tahun 2005 yang sebesar 4,90 persen dengan nilai PDRB sebesar 12,7 triliun rupiah.



Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, 2000-2006

Jika dilihat dari sisi penggunaan, perekonomian di tahun 2006, masih didominasi oleh komponen konsumsi (rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, dan pemerintah) di mana kontribusinya terhadap total PDRB tercatat sebesar 72,53 persen, sementara sisanya yang sebesar 27,47 persen merupakan kontribusi dari komponen PMTB, perubahan stok, serta net ekspor barang dan jasa.



Gambar 4.2. Distribusi Komponen PDRB Menurut Penggunaan, 2006

Dalam pembentukan PDRB tahun 2006, konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan kontribusi terbesar (45,69 persen). Kontribusi kedua dan ketiga terbesar setelah komponen konsumsi rumah tangga adalah komponen konsumsi pemerintah (23,95 persen) dan komponen pembentukan modal tetap bruto (18,76 persen). Kontribusi konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi tersebut berhubungan dengan kebiasaan/budaya masyarakat Sulawesi Utara yang cenderung konsumtif yang didukung pula oleh maraknya pembangunan dan pembukaan pusat-pusat perbelanjaan baru di kota Manado, seperti Boulevard Mall, Hypermart, dll.

4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2006 masih digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Hal ini terlihat dari hampir setengah dari total PDRB selama kurun waktu 2000-2006 digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga, yang didukung oleh PDRB perkapita yang semakin meningkat diikuti dengan penambahan jumlah penduduk di Sulawesi Utara. Tabel 4.1. memperlihatkan besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 yang terjadi selama periode 2000-2006.

Dalam empat tahun terakhir, kontribusi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB memang mengalami penurunan, namun besarnya kontribusi tidak pernah berada di bawah level 45 persen. Kontribusi terbesar konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 48,88 persen.

Tabel 4.1 Komposisi Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB adhb dan adhk, 2000–2006 (dalam persen)

Tahun	ADHB		ADHK	
	Konsumsi Rumah Tangga	Lainnya	Konsumsi Rumah Tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	47.29	52.71	47.29	52.71
2001	47.63	52.37	47.17	52.83
2002	48.88	51.12	47.21	52.79
2003	47.80	52.20	46.06	53.94
2004	46.05	53.95	46.38	53.62
2005	45.41	54.59	44.72	55.28
2006	45.69	54.31	42.96	57.04

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok non makanan. Konsumsi untuk kelompok makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan komponen konsumsi rumah tangga dibandingkan konsumsi kelompok non makanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2., di mana secara rata-rata hampir 60 persen dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga terserap untuk keperluan kelompok makanan, sedangkan sisanya untuk kelompok non makanan.

Tabel 4.2 Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB dan ADHK, 2000-2006(dalam persen)

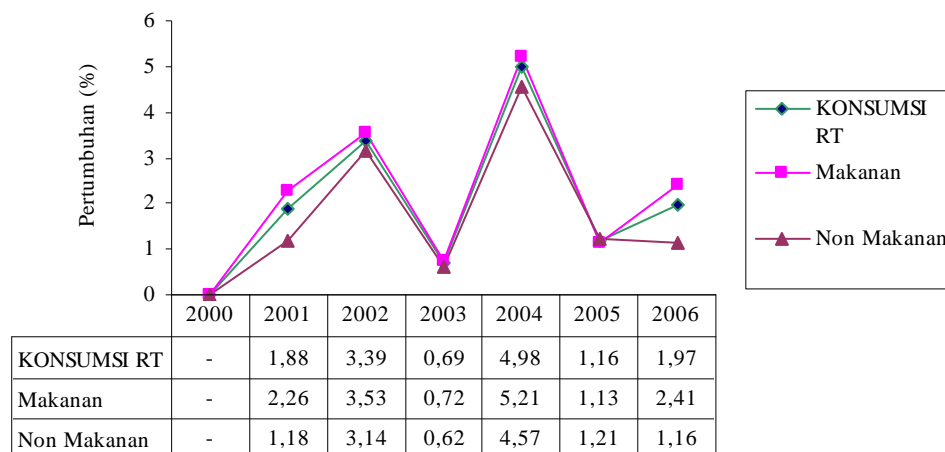
Tahun	ADHB			ADHK		
	Makanan	Non Makanan	Konsumsi Rumah Tangga	Makanan	Non Makanan	Konsumsi Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	64.23	35.77	100.00	64.23	35.77	100.00
2001	61.33	38.67	100.00	64.48	35.52	100.00
2002	60.27	39.73	100.00	64.56	35.44	100.00
2003	56.74	43.26	100.00	64.59	35.41	100.00
2004	58.36	41.64	100.00	64.73	35.27	100.00
2005	58.26	41.74	100.00	64.71	35.29	100.00
2006	59.97	40.03	100.00	64.99	35.01	100.00

Persentase terbesar untuk konsumsi kelompok makanan atas dasar harga berlaku terjadi pada tahun 2000 (64,23 persen), sedangkan persentase terkecil terjadi pada tahun 2003 (56,74 persen).

Pada tahun 2006, tingginya kontribusi kelompok makanan terhadap total konsumsi rumah tangga yang sebesar 59,97 persen dipicu oleh kelompok komoditi padi-padian, sayur-sayuran, dan ikan. Sedangkan untuk kelompok non makanan, kontribusi sebesar 40,03 persen dipengaruhi oleh kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, serta barang-barang tahan lama.

Berdasarkan komponen pembentuknya, laju pertumbuhan kegiatan konsumsi rumah tangga disumbangkan baik oleh kegiatan yang berasal dari konsumsi makanan maupun non makanan. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2006 mencapai 1,97 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,16 persen. Percepatan laju pertumbuhan tersebut kurang lebih dipengaruhi oleh konsumsi kelompok makanan yang juga bertumbuh sebesar 2,41 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,13 persen. Sedangkan untuk kegiatan yang berasal dari konsumsi non makanan, laju pertumbuhan justru melambat menjadi sebesar 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,21 persen.

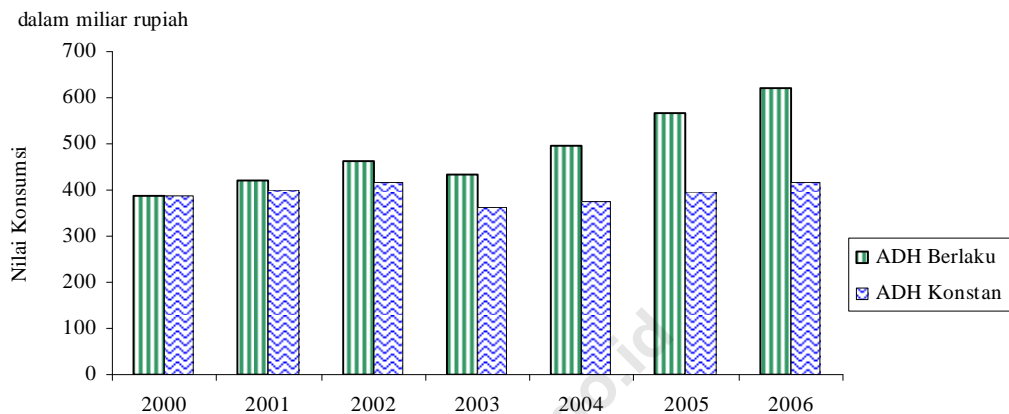
Selama periode 2000-2006, laju pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2004, yang berada pada level 4,98 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga bertumbuh sebesar 1,88 persen di tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 mencapai 3,39 persen, dan di tahun 2003 melambat secara cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,69 persen (angka tersebut merupakan yang terendah dalam periode 2000–2006).



Gambar 4.3. Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga adhk 2000

4.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta non profit baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam empat tahun terakhir terlihat mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada grafik batang di bawah ini yang menunjukkan adanya penambahan nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba selama periode 2003-2006.



Gambar 4.4. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba ADHB dan ADHK, 2000-2006

Nilai konsumsi terendah atas harga berlaku selama kurun waktu 2000-2006 terjadi di tahun 2000 yaitu sebesar 386 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2000, nilai konsumsi terendah adalah sebesar 361 miliar rupiah pada tahun 2003. Tahun 2006, PDRB atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba mencapai 620 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan mencapai 415 miliar rupiah.

Peranan lembaga swasta nirlaba dalam penggunaan PDRB sepanjang kurun waktu 2000-2006 terlihat masih relatif kecil, yaitu di bawah 4 persen dengan rata-rata kontribusi setiap tahun sebesar 3,26 persen terhadap total PDRB. Meskipun secara umum nilai konsumsi lembaga swasta mengalami kenaikan, namun sumbangannya terhadap pembentukan PDRB cenderung menurun. Pada tahun 2000, kontribusinya telah mencapai 3,61 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2003 kontribusinya menjadi 3,06 persen. Memasuki tahun 2004, kontribusinya naik menjadi 3,14 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2006 menjadi sebesar 2,88 persen.

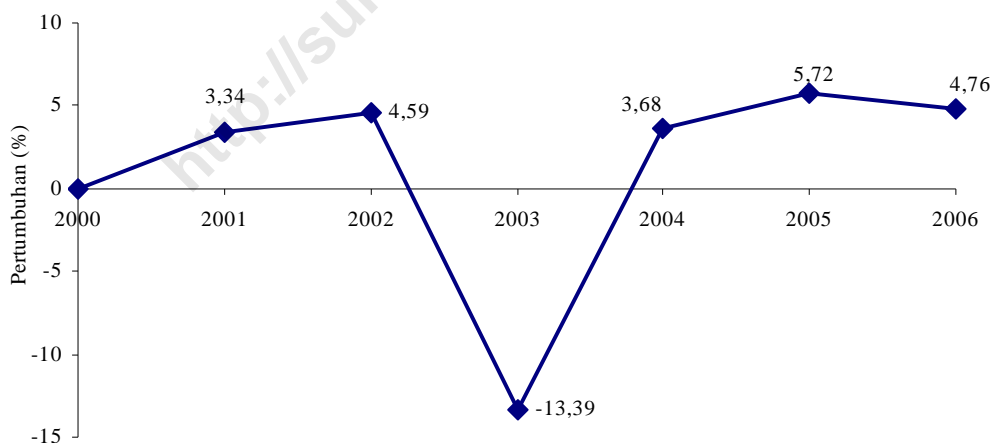
Tabel 4.3. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba, 2000-2006

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai (Miliar Rp)							
ADH Berlaku	386	422	461	433	494	567	620
ADH Konstan	386	399	417	361	375	396	415
Persen							
Laju Pertumbuhan ¹⁾	-	3,34	4,59	(13,39)	3,68	5,72	4,76
Kontribusi ²⁾	3,61	3,58	3,53	3,06	3,14	3,02	2,88

1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Sementara untuk laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan 2000 cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2000-2006. Pada tahun 2001 konsumsi lembaga swasta non profit bertumbuh sebesar 3,34 persen, kemudian pada tahun 2002 naik menjadi 4,59 persen, namun pada tahun 2003, konsumsi bertumbuh negatif secara signifikan sebesar -13,39 persen yang merupakan angka terendah dalam periode 2000-2006.



Gambar 4.5. Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba, 2000-2006

Tahun 2004, laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba meningkat menjadi sebesar 3,68 persen dan mencapai 5,72 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta non profit kembali melambat menjadi sebesar 4,76 persen.

4.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Nilai konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2000-2006, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (lihat tabel 4.4.). Tahun 2000, PDRB yang digunakan untuk keperluan konsumsi pemerintah adalah sebesar 1.620 miliar rupiah dan pada tahun 2006 nilai konsumsi pemerintah telah mencapai 5.150 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 3.149 miliar rupiah atas dasar harga konstan. Besarnya nilai konsumsi ini didorong oleh kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal tahun 2006 dan adanya pertambahan jumlah PNS yang meningkat dibandingkan tahun 2005.

Sumbangan konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDRB menurut penggunaan dalam kurun waktu 2000-2006 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2000, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 15,14 persen, tahun 2001 dan 2002 kontribusinya menjadi sekitar 19 persen. Memasuki tahun 2003, kontribusi konsumsi pemerintah berada pada level di atas 20 persen, dengan rata-rata 22,42 persen setiap tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 23,95 persen.

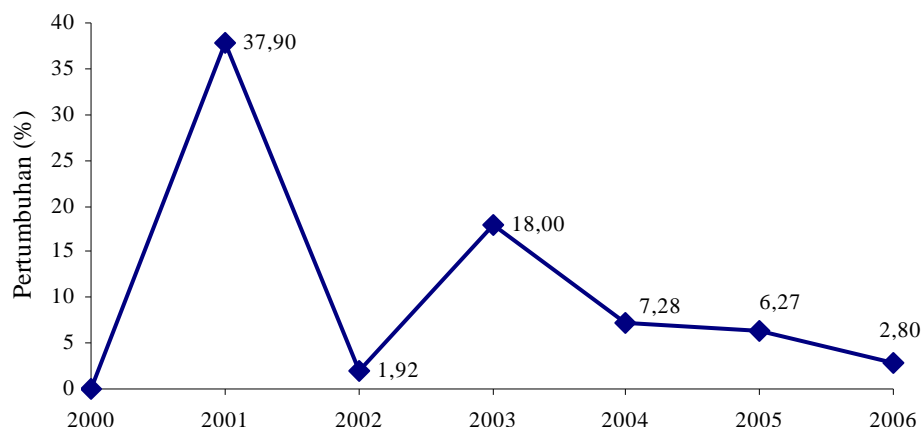
Tabel 4.4 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 2000-2006

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai (Miliar Rp)							
ADH Berlaku	1.620	2.302	2.480	2.953	3.314	4.318	5.150
ADH Konstan 2000	1.620	2.234	2.277	2.687	2.882	3.063	3.149
Persen							
Laju Pertumbuhan ¹⁾	-	37,90	1,92	18,01	7,28	6,27	2,80
Kontribusi ²⁾	15,14	19,52	18,97	20,85	21,07	23,01	23,95

1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah berfluktuasi selama periode 2000-2006. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 37,90 persen terjadi pada tahun 2001 dan laju pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 1,92 persen. Sementara pada tahun 2006 konsumsi pemerintah bertumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,80 persen.



Gambar 4.6. Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Penggunaan untuk PMTB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama tahun 2000-2006 terus mengalami peningkatan (lihat tabel 4.5). Investasi fisik yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000 sebesar 1.747 miliar, meningkat menjadi 1.985 miliar di tahun 2001 dan sampai tahun 2006 nilai investasi fisik yang terbentuk telah mencapai 4.034 miliar rupiah. Peningkatan ini merupakan dampak dari masuknya investor di Sulawesi Utara, yang ditunjukkan dengan maraknya pembangunan hotel dan pusat-pusat perbelanjaan/mal, dan meningkatnya realisasi pembangunan proyek-proyek pemerintah, antara lain perbaikan sarana jalan dan perbaikan/pembangunan jembatan di Sulawesi Utara.

Tabel 4.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2000-2006

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai (Miliar Rp)							
ADH Berlaku	1.747	1.985	2.193	2.377	2.564	3.133	4.034
ADH Konstan 2000	1.747	1.873	1.986	1.912	2.041	2.309	2.649
Persen							
Laju Pertumbuhan 1)	-	7,24	6,04	(3,72)	6,74	13,11	14,70
Kontribusi 2)	16,32	16,83	16,77	16,78	16,30	16,69	18,76

1) Perhitungan atas dasar harga konstan

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Tahun 2002, laju pertumbuhan investasi sebesar 6,04 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2001 yang sebesar 7,24 persen. Tahun 2003 investasi bertumbuh negatif sebesar -3,72 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006,

di mana pada tahun 2006 laju pertumbuhan investasi mencapai 14,70 persen.

Kontribusi komponen PMTB terhadap PDRB sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2005 berkisar antara 16-17 persen dan pada tahun 2006, penggunaan PDRB untuk investasi fisik meningkat menjadi sebesar 18,76 persen.

4.5 Ekspor Dan Impor

Perdagangan barang dan jasa Sulawesi Utara selama kurun waktu 2000-2006 masih mengalami surplus. Kondisi surplus perdagangan terlihat dari total ekspor perdagangan dalam negeri (antar provinsi) dan luar negeri yang lebih besar dibandingkan dengan total impornya. Perdagangan luar negeri lebih didominasi oleh kegiatan ekspor, sedangkan untuk perdagangan dalam negeri (antar provinsi) lebih didominasi oleh kegiatan impor. Hal ini terlihat dari aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Bitung di mana intensitas kegiatan bongkar barang lebih tinggi dibandingkan kegiatan muatnya, yang berarti barang-barang yang masuk ke Sulawesi Utara lebih banyak dibandingkan barang yang keluar. Besarnya nilai impor mencerminkan bahwa tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap provinsi lain di luar Sulawesi Utara masih cukup tinggi (lihat lampiran).

Tabel 4.6 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, 2000-2006

TAHUN	PDRB ADHB (dalam Miliar Rp)		PDRB ADHK (dalam Miliar Rp)		Pertumbuhan ¹⁾ (dalam persen)		Kontribusi ²⁾ (dalam persen)	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
2000	4411	2907	4411	2907	-	-	41,22	27,17
2001	4008	2751	2830	1749	(35,84)	(39,86)	33,99	23,33
2002	4149	2842	2826	1765	(0,15)	0,93	31,73	21,74
2003	4536	3023	3604	2386	27,50	35,19	32,03	21,35
2004	6430	4457	5100	4012	41,52	68,16	40,88	28,34
2005	6542	4472	5378	4202	5,45	4,72	34,87	23,83
2006	7437	5899	6139	4817	14,16	14,64	34,58	27,43

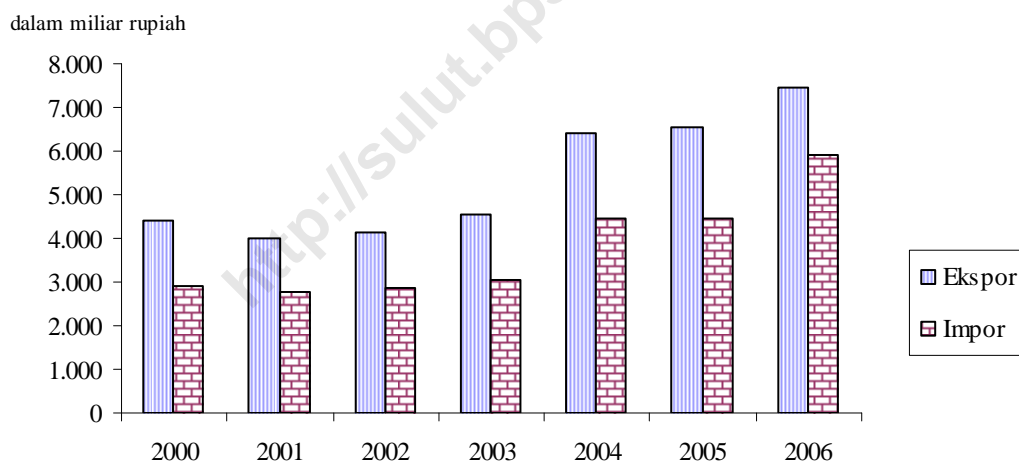
1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Nilai ekspor Sulawesi Utara atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2000-2006 cenderung meningkat. Nilai ekspor barang dan jasa tahun 2000 menurut harga berlaku dan konstan tercatat sebesar 4.411 miliar rupiah, sementara nilai impor barang dan jasa 2.907 miliar rupiah. Di sepanjang tahun 2000-2002, nilai ekspor maupun impor barang dan jasa atas dasar harga konstan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan dalam kurun waktu 2003-2006 nilainya mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Pada tahun 2006, kinerja perdagangan luar negeri khususnya ekspor cukup baik. Kontribusi tertinggi terhadap total nilai ekspor perdagangan luar negeri berasal dari komoditi minyak kelapa kasar yang merupakan hasil industri produk lokal. Namun peningkatan kinerja ekspor diiringi oleh meningkatnya nilai realisasi impor. Nilai ekspor barang dan jasa sudah mencapai 7.437 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 6.139 miliar rupiah atas dasar harga konstan. Sementara nilai impor barang dan jasa sebesar 5.899 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 4.817 miliar rupiah atas dasar harga konstan.

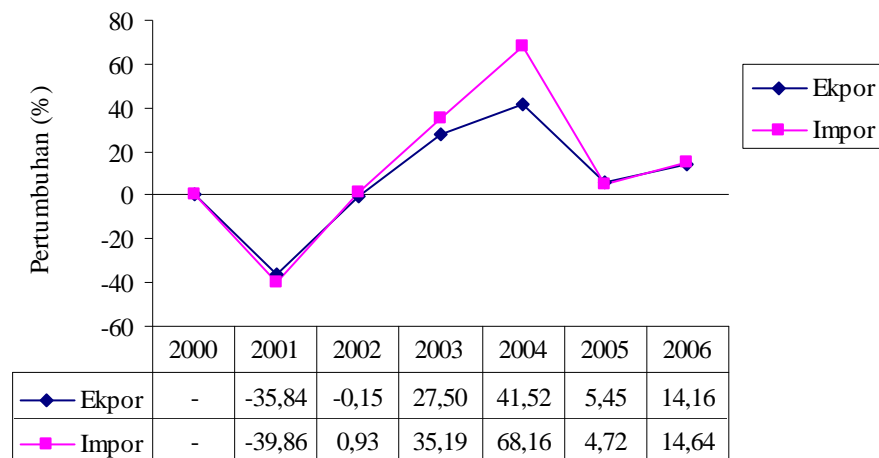
Rata-rata kontribusi ekspor barang dan jasa setiap tahun adalah sebesar 35,62 persen. Meskipun nilai ekspor umumnya mengalami kenaikan, namun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB dalam dua tahun terakhir ini cenderung turun yaitu dari tahun 2004 yang telah mencapai 40,88 persen turun menjadi 34,87 persen pada tahun 2005 dan turun lagi menjadi 34,58 persen pada tahun 2006. Sementara untuk kontribusi impor barang dan jasa, nilainya berfluktuasi dengan kisaran nilai 20–30 persen, di mana kontribusi yang terbesar terjadi pada tahun 2004 (28,34 persen) dan yang terkecil pada tahun 2003 (21,35 persen).



Cambar 4.7. Nilai Ekspor, Impor Barang dan Jasa ADHB, 2000-2006

Tahun 2001, ekspor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -35,84 persen, kemudian pada tahun 2002 laju pertumbuhannya mengalami percepatan tetapi masih bertumbuh negatif sebesar -0,15 persen, memasuki tahun 2003, laju pertumbuhan ekspor meningkat menjadi 27,50 persen. Pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 41,52 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2005, laju pertumbuhan ekspor kembali melambat namun tetap bertumbuh positif sebesar 5,45 persen, dan di tahun 2006, pertumbuhan ekspor meningkat menjadi 14,16 persen.

Tahun 2001, impor bertumbuh negatif sebesar 39,86 persen dibandingkan tahun dasar 2000, namun memasuki tahun 2002 impor telah bertumbuh positif (0,93 persen) .



Gambar 4.7. Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Barang dan Jasa

Kenaikan laju pertumbuhan impor juga terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 35,19 persen, bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan impor tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 68,16 persen. Sama halnya dengan laju pertumbuhan ekspor yang melambat di tahun 2005 dan meningkat di tahun 2006, pertumbuhan impor juga turun menjadi sebesar 4,72 persen di tahun 2005, namun naik lagi di tahun 2006 menjadi sebesar 14,64 persen.

LAMPIRAN

<http://sulut.bps.go.id>

TABEL 1.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 TAHUN 2000 - 2006
 (Jutaan Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	5.060.649,37	5.617.205,94	6.390.988,81	6.769.134,40	7.242.989,57	8.519.975,52	9.825.827,97
Makanan	3.250.531,91	3.444.920,04	3.851.591,95	3.840.859,33	4.227.089,36	4.963.425,78	5.892.649,79
Non Makanan	1.810.117,46	2.172.285,90	2.539.396,86	2.928.275,06	3.015.900,21	3.556.549,74	3.933.178,18
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	385.944,00	422.112,00	461.488,00	432.732,00	494.136,00	566.921,56	620.239,43
KONSUMSI PEMERINTAH	1.619.840,00	2.301.732,00	2.479.990,00	2.953.305,00	3.314.435,00	4.318.413,50	5.149.750,31
PMTB	1.746.800,00	1.984.808,00	2.193.217,00	2.376.640,00	2.564.253,00	3.132.546,11	4.034.437,45
PERUBAHAN STOK	383.743,00	209.613,00	243.364,00	117.436,00	138.329,00	154.885,75	335.640,20
EKSPOR	4.411.490,41	4.008.446,26	4.149.253,27	4.536.081,34	6.430.288,57	6.542.449,90	7.437.052,52
Antar Negara	1.784.444,00	209.372,00	634.783,00	1.519.575,00	3.385.856,00	3.833.739,21	4.064.178,94
Antara Pulau/Propinsi	2.627.046,41	3.799.074,26	3.514.470,27	3.016.506,34	3.044.432,57	2.708.710,69	3.372.873,57
IMPOR	2.907.333,55	2.750.971,63	2.842.433,00	3.023.449,41	4.456.682,15	4.471.713,24	5.899.250,77
Antar Negara	152.132,00	20.115,00	137.398,00	154.426,00	188.829,00	107.591,59	577.220,63
Antara Pulau/Propinsi	2.755.201,55	2.730.856,63	2.705.035,00	2.869.023,41	4.267.853,15	4.364.121,65	5.322.030,14
P D R B	10.701.133,23	11.792.945,57	13.075.868,08	14.161.879,33	15.727.748,98	18.763.479,10	21.503.697,10

TABEL 2.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 TAHUN 2000 - 2006
 (Jutaan Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	5.060.649,37	5.155.554,58	5.330.407,60	5.367.063,45	5.634.527,36	5.699.927,18	5.812.205,06
Makanan	3.250.531,91	3.324.135,15	3.441.457,05	3.466.350,90	3.646.968,14	3.688.304,85	3.777.265,33
Non Makanan	1.810.117,46	1.831.419,43	1.888.950,55	1.900.712,55	1.987.559,22	2.011.622,33	2.034.939,73
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	385.944,00	398.853,00	417.150,00	361.288,00	374.595,00	396.030,92	414.866,30
KONSUMSI PEMERINTAH	1.619.840,00	2.233.780,00	2.276.666,00	2.686.513,00	2.882.117,00	3.062.704,61	3.148.550,27
PMTB	1.746.800,00	1.873.344,00	1.986.430,00	1.912.481,00	2.041.440,00	2.309.135,75	2.648.553,66
PERUBAHAN STOK	383.743,00	185.498,00	219.247,00	107.739,00	128.950,00	100.575,17	182.771,18
EKSPOR	4.411.490,41	2.830.459,61	2.826.318,81	3.603.543,02	5.099.846,90	5.377.681,86	6.139.412,40
Antar Negara	1.784.444,00	178.897,00	619.602,00	1.593.534,00	3.080.061,00	3.537.961,66	3.899.573,75
Antara Pulau/Propinsi	2.627.046,41	2.651.562,61	2.206.716,81	2.010.009,02	2.019.785,90	1.839.720,20	2.239.838,65
IMPOR	2.907.333,54	1.748.513,27	1.764.756,63	2.385.834,10	4.011.974,99	4.201.505,71	4.816.717,60
Antar Negara	152.132,00	17.187,00	134.112,00	161.942,00	194.798,00	59.244,31	580.556,66
Antara Pulau/Propinsi	2.755.201,54	1.731.326,27	1.630.644,63	2.223.892,10	3.817.176,99	4.142.261,40	4.236.160,94
P D R B	10.701.133,24	10.928.975,92	11.291.462,78	11.652.793,37	12.149.501,26	12.744.549,77	13.529.641,27

TABEL 3.

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 TAHUN 2000 - 2005
 (PERSENTASE)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	47,29	47,63	48,88	47,80	46,05	45,41	45,69
Makanan	30,38	29,21	29,46	27,12	26,88	26,45	27,40
Non Makanan	16,92	18,42	19,42	20,68	19,18	18,95	18,29
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	3,61	3,58	3,53	3,06	3,14	3,02	2,88
KONSUMSI PEMERINTAH	15,14	19,52	18,97	20,85	21,07	23,01	23,95
PMTB	16,32	16,83	16,77	16,78	16,30	16,69	18,76
PERUBAHAN STOK	3,59	1,78	1,86	0,83	0,88	0,83	1,56
EKSPOR	41,22	33,99	31,73	32,03	40,88	34,87	34,58
Antar Negara	16,68	1,78	4,85	10,73	21,53	20,43	18,90
Antara Pulau/Propinsi	24,55	32,21	26,88	21,30	19,36	14,44	15,69
IMPOR	27,17	23,33	21,74	21,35	28,34	23,83	27,43
Antar Negara	1,42	0,17	1,05	1,09	1,20	0,57	2,68
Antara Pulau/Propinsi	25,75	23,16	20,69	20,26	27,14	23,26	24,75
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4.

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 TAHUN 2000 - 2006
 (PERSENTASE)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	47,29	47,17	47,21	46,06	46,38	44,72	42,96
Makanan	30,38	30,42	30,48	29,75	30,02	28,94	27,92
Non Makanan	16,92	16,76	16,73	16,31	16,36	15,78	15,04
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	3,61	3,65	3,69	3,10	3,08	3,11	3,07
KONSUMSI PEMERINTAH	15,14	20,44	20,16	23,05	23,72	24,03	23,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMTB	16,32	17,14	17,59	16,41	16,80	18,12	19,58
PERUBAHAN STOK	3,59	1,70	1,94	0,92	1,06	0,79	1,35
EKSPOR	41,22	25,90	25,03	30,92	41,98	42,20	45,38
Antar Negara	16,68	1,64	5,49	13,68	25,35	27,76	28,82
Antara Pulau/Propinsi	24,55	24,26	19,54	17,25	16,62	14,44	16,56
IMPOR	27,17	16,00	15,63	20,47	33,02	32,97	35,60
Antar Negara	1,42	0,16	1,19	1,39	1,60	0,46	4,29
Antara Pulau/Propinsi	25,75	15,84	14,44	19,08	31,42	32,50	31,31
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 5.

INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 (2000 = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	111,00	126,29	133,76	143,12	168,36	194,16
Makanan	100	105,98	118,49	118,16	130,04	152,70	181,28
Non Makanan	100	120,01	140,29	161,77	166,61	196,48	217,29
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	109,37	119,57	112,12	128,03	146,89	160,71
KONSUMSI PEMERINTAH	100	142,10	153,10	182,32	204,61	266,60	317,92
PMTB	100	113,63	125,56	136,06	146,80	179,33	230,96
PERUBAHAN STOK	100	54,62	63,42	30,60	36,05	40,36	87,46
EKSPOR	100	90,86	94,06	102,82	145,76	148,30	168,58
Antar Negara	100	11,73	35,57	85,16	189,74	214,84	227,76
Antara Pulau/Propinsi	100	144,61	133,78	114,83	115,89	103,11	128,39
IMPOR	100	94,62	97,77	103,99	153,29	153,81	202,91
Antar Negara	100	13,22	90,31	101,51	124,12	70,72	379,42
Antara Pulau/Propinsi	100	99,12	98,18	104,13	154,90	158,40	193,16
P D R B	100	110,20	122,19	132,34	146,97	175,34	200,95

TABEL 6.

INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 (2000 = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	101,88	105,33	106,05	111,34	112,63	114,85
Makanan	100	102,26	105,87	106,64	112,20	113,47	116,20
Non Makanan	100	101,18	104,36	105,00	109,80	111,13	112,42
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	103,34	108,09	93,61	97,06	102,61	107,49
KONSUMSI PEMERINTAH	100	137,90	140,55	165,85	177,93	189,07	194,37
PMTB	100	107,24	113,72	109,48	116,87	132,19	151,62
PERUBAHAN STOK	100	48,34	57,13	28,08	33,60	26,21	47,63
EKSPOR	100	64,16	64,07	81,69	115,60	121,90	139,17
Antar Negara	100	10,03	34,72	89,30	172,61	198,27	218,53
Antara Pulau/Propinsi	100	100,93	84,00	76,51	76,88	70,03	85,26
IMPOR	100	60,14	60,70	82,06	138,00	144,51	165,67
Antar Negara	100	11,30	88,16	106,45	128,05	38,94	381,61
Antara Pulau/Propinsi	100	62,84	59,18	80,72	138,54	150,34	153,75
P D R B	100	102,13	105,52	108,89	113,53	119,10	126,43

TABEL 7.

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 (TAHUN SEBELUMNYA = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	111,00	113,78	105,92	107,00	117,63	115,33
Makanan	100	105,98	111,80	99,72	110,06	117,42	118,72
Non Makanan	100	120,01	116,90	115,31	102,99	117,93	110,59
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	109,37	109,33	93,77	114,19	114,73	109,40
KONSUMSI PEMERINTAH	100	142,10	107,74	119,09	112,23	130,29	119,25
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	113,63	110,50	108,36	107,89	122,16	128,79
PERUBAHAN STOK	100	54,62	116,10	48,26	117,79	111,97	216,70
EKSPOR	100	90,86	103,51	109,32	141,76	101,74	113,67
Antar Negara	100	11,73	303,18	239,38	222,82	113,23	106,01
Antara Pulau/Propinsi	100	144,61	92,51	85,83	100,93	88,97	124,52
IMPOR	100	94,62	103,32	106,37	147,40	100,34	131,92
Antar Negara	100	13,22	683,06	112,39	122,28	56,98	536,49
Antara Pulau/Propinsi	100	99,12	99,05	106,06	148,76	102,26	121,95
P D R B	100	110,20	110,88	108,31	111,06	119,30	114,60

TABEL 8.

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 (TAHUN SEBELUMNYA = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	101,88	103,39	100,69	104,98	101,16	101,97
Makanan	100	102,26	103,53	100,72	105,21	101,13	102,41
Non Makanan	100	101,18	103,14	100,62	104,57	101,21	101,16
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	103,34	104,59	86,61	103,68	105,72	104,76
KONSUMSI PEMERINTAH	100	137,90	101,92	118,00	107,28	106,27	102,80
PMTB	100	107,24	106,04	96,28	106,74	113,11	114,70
PERUBAHAN STOK	100	48,34	118,19	49,14	119,69	78,00	181,73
EKSPOR	100	64,16	99,85	127,50	141,52	105,45	114,16
Antar Negara	100	10,03	346,35	257,19	193,28	114,87	110,22
Antara Pulau/Propinsi	100	100,93	83,22	91,09	100,49	91,08	121,75
IMPOR	100	60,14	100,93	135,19	168,16	104,72	114,64
Antar Negara	100	11,30	780,31	120,75	120,29	30,41	979,94
Antara Pulau/Propinsi	100	62,84	94,18	136,38	171,64	108,52	102,27
P D R B	100	102,13	103,32	103,20	104,26	104,90	106,16

TABEL 9.

INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	108,95	119,90	126,12	128,55	149,48	169,06
Makanan	100	103,63	111,92	110,80	115,91	134,57	156,00
Non Makanan	100	118,61	134,43	154,06	151,74	176,80	193,28
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	105,83	110,63	119,77	131,91	143,15	149,50
KONSUMSI PEMERINTAH	100	103,04	108,93	109,93	115,00	141,00	163,56
PMTB	100	105,95	110,41	124,27	125,61	135,66	152,33
PERUBAHAN STOK	100	113,00	111,00	109,00	107,27	154,00	183,64
EKSPOR	100	141,62	146,81	125,88	126,09	121,66	121,14
Antar Negara	100	117,03	102,45	95,36	109,93	108,36	104,22
Antara Pulau/Propinsi	100	143,28	159,26	150,07	150,73	147,23	150,59
IMPOR	100	157,33	161,07	126,73	111,08	106,43	122,47
Antar Negara	100	117,04	102,45	95,36	96,94	181,61	99,43
Antara Pulau/Propinsi	100	157,73	165,89	129,01	111,81	105,36	125,63
P D R B	100	107,91	115,80	121,53	129,45	147,23	158,94

TABEL 10.

PERTUMBUHAN

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA		1,88	3,39	0,69	4,98	1,16	1,97
Makanan		2,26	3,53	0,72	5,21	1,13	2,41
Non Makanan		1,18	3,14	0,62	4,57	1,21	1,16
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT		3,34	4,59	(13,39)	3,68	5,72	4,76
KONSUMSI PEMERINTAH		37,90	1,92	18,00	7,28	6,27	2,80
PMTB		7,24	6,04	(3,72)	6,74	13,11	14,70
PERUBAHAN STOK		(51,66)	18,19	(50,86)	19,69	(22,00)	81,73
EKSPOR		(35,84)	(0,15)	27,50	41,52	5,45	14,16
Antar Negara		(89,97)	246,35	157,19	93,28	14,87	10,22
Antara Pulau/Propinsi		0,93	(16,78)	(8,91)	0,49	(8,92)	21,75
IMPOR		(39,86)	0,93	35,19	68,16	4,72	14,64
Antar Negara		(88,70)	680,31	20,75	20,29	(69,59)	879,94
Antara Pulau/Propinsi		(37,16)	(5,82)	36,38	71,64	8,52	2,27
P D R B		2,13	3,32	3,20	4,26	4,90	6,16

<http://sulut.bps.go.id>